



Merajut Inisiatif Pendanaan Konservasi Berkelanjutan dan Pengendalian Perubahan Iklim di Kawasan Wallacea

1 Oktober 2019, Makassar

MENGAPA KAJIAN INI PENTING?

1

Indonesia dijuluki Megabiodiversity Country, pemilik empat World Heritage Site, 14 Biosphere Reserve, enam Ramsar Site, tujuh ASEAN Heritage Parks (AHP), dan empat UNESCO Global Geopark.

2

Indonesia bertanggung jawab melaksanakan the Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 untuk mencapai Aichi Biodiversity Target dan juga target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada kawasan konservasi.

3

Lebih dari separuh spesies mamalia, 40% jenis burung, dan 65% jenis amfibi dari jenis-jenis satwa di seluruh dunia terdapat di Wallacea.

4

Lebih kurang 308 spesies di Wallacea baik darat maupun perairan dikategorikan sebagai spesies terancam secara global oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

PERMASA LAHAN

- Masih banyaknya area-area konservasi yang belum terkelola karena minimnya anggaran operasional dari APBN.



- Tingginya prevalensi ancaman dari aktivitas manusia dan perubahan iklim di seluruh *Key Biodiversity Areas (KBA) hotspot Wallacea*.



- Masih minimnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil baik dalam hal tata kelola, tata laksana, maupun keberlanjutannya.



- Belum banyak inisiatif pelembagaan pendanaan konservasi dan perubahan iklim dalam konteks Wallacea sebagai sebuah *landscape/seascape*.



Tujuan **Kajian**

Nilai Strategis

Mengidentifikasi nilai strategis Wallacea sebagai biogeografis penting di Indonesia dan dunia

Format Pendanaan Konservasi dan Model Ideal

Meninjau format pendanaan konservasi dan menawarkan model ideal untuk diterapkan di Wallacea

Rekomendasi Peta Jalan Menuju Pelembagaan Pendanaan Konservasi

Merekomendasikan peta jalan pengembangan kelembagaan pendanaan berkelanjutan di Wallacea, jika memang dianggap cukup potensial dan cukup layak untuk dikembangkan

Perubahan Iklim dan Konservasi Kehati

Aichi Biological
Diversity
2015-2020

Global target to
reduce the loss
rate of
biodiversity

IBSAP
2015-2020

Konservasi
Kehati

Menyerap emisi
karbon/stok karbon

NDC

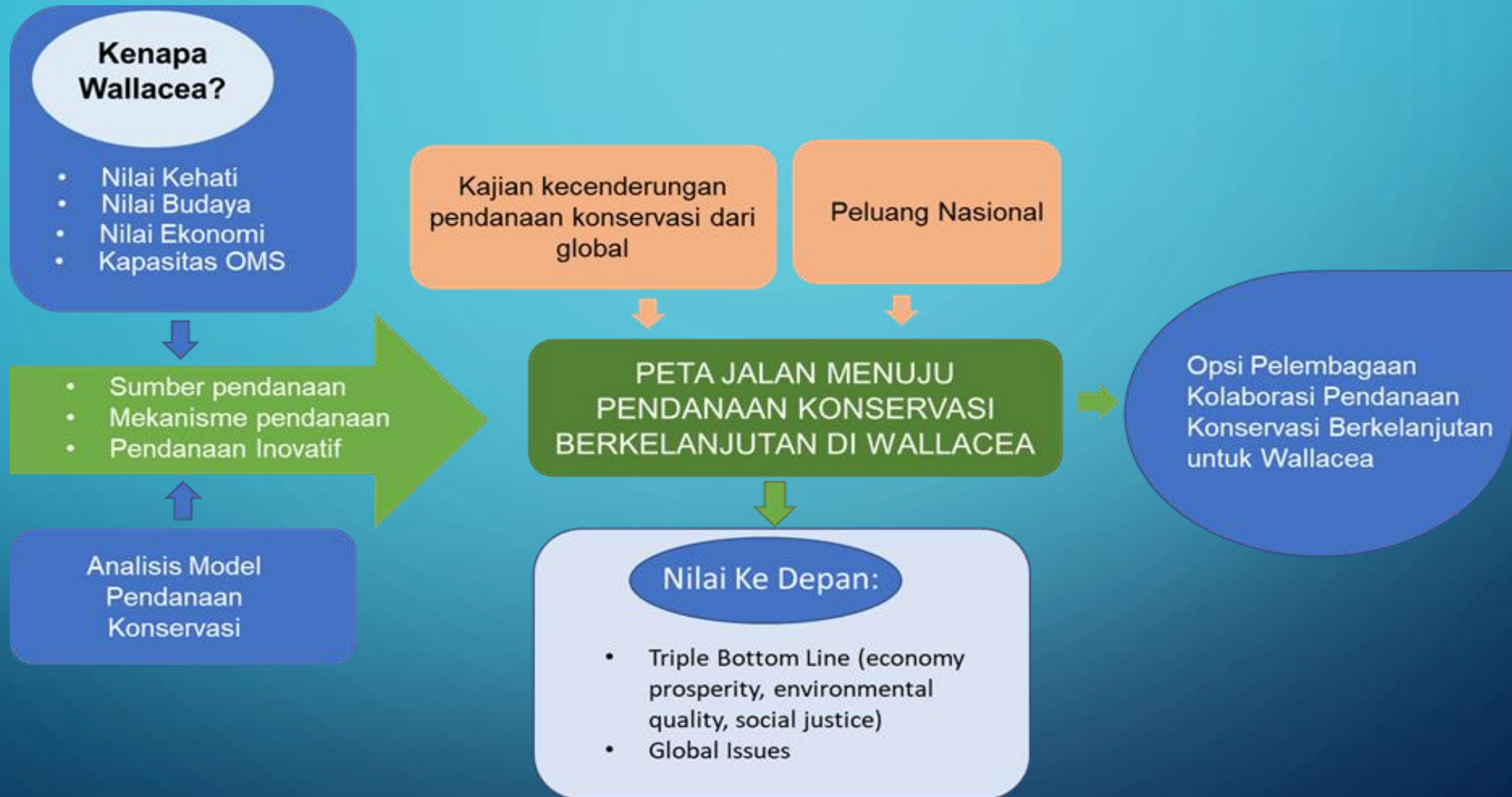
Target 29 % - 41 %

Pengendalian
Perubahan
Iklim

Menekan laju
deforestasi dan
degradasi hutan



Konsep Kajian Pendanaan Konservasi



NILAI STRATEGIS WALLACEA



KEANEKARAGAMAN SPESIES

Ciri khas keanekaragaman hayati di Wallacea sebagian berasal dari kelompok taksonomi yang tergolong endemis. Persentase terbesar berasal dari kelompok taksonomi amfibia (68%) dan mamalia (57%). Kelompok taksonomi yang juga penting diperhatikan yaitu kupu-kupu sayap burung (50%), reptil (44%), dan burung (39%).



RINGKASAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DI WALLACEA

Kelompok Taksonomi	Total # jenis	# Jenis endemis (persen)	# Jenis terancam punah (persen)
Tumbuhan	10,000	>1,500 (15)	66 (1)
Mamalia	222	127 (57)	64 (29)
Burung	711	274 (39)	61 (9)
Reptil	222	99 (44)	10 (5)
Kupu-kupu sayap burung	80	40 (50)	7 (9)
Capung			7
Amfibia	48	33 (68)	8 (17)
Ikan air tawar	250	50 (20)	37 (15)
Dekapoda	32		
Calanoida (Kopepoda)			1
Molluska			2
Koral	450	Few	176 (39)
Bivalvia laut			2
Ikan laut	2,112	110 (5)	54 (2)
Teripang			10

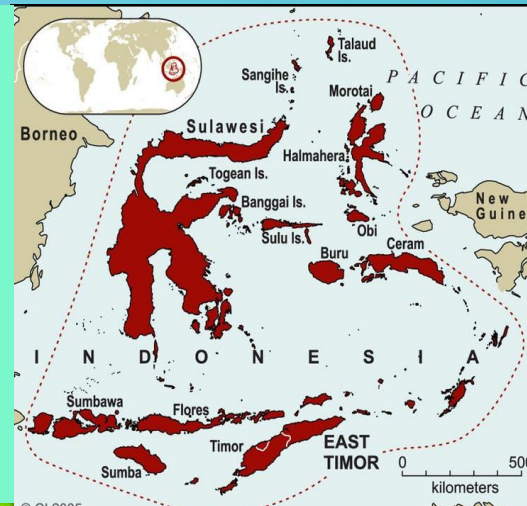
Sumber: CI, 2010; Burung Indonesia, 2013.

KAWASAN KONSERVASI

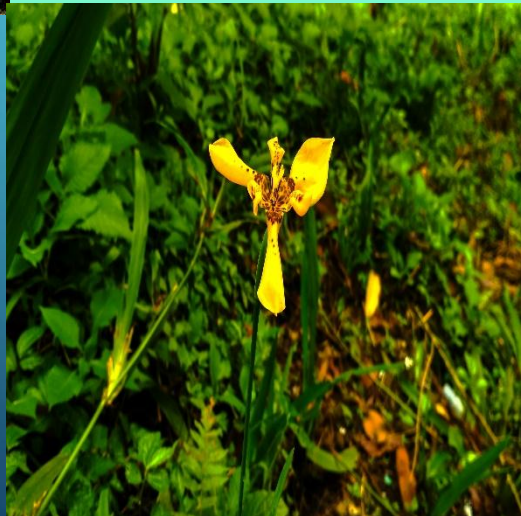
Kawasan konservasi mencakup:



Area yang dikelola
oleh Pemerintah
melalui kementerian
teknis yaitu KLHK
dan KKP



This Photo by Unknown Author is licensed under
CC BY-SA



Area yang teridentifikasi dalam profil
ekosistem *hostspot* Wallacea yang disebut
dengan *Key Biodiversity Area* (KBA); terdiri
dari kawasan konservasi, kawasan lindung
daerah aliran sungai, kawasan produksi, dan
kawasan di luar hutan negara.

Luas Area Konservasi di Wallacea

Kawasan Konservasi	Luas dalam Hektare
Dikelola KLHK	2.823.106 (data 2014)
Dikelola KKP	10.471.256 (data 2019)
KBA	8.983.061 (data 2014)
Total	19.530.212 *

* Setelah dikurangi area konservasi seluas 2.747.211 hektare karena beririsan.

EKONOMI

- Kawasan Wallacea mencakup 10 wilayah administratif yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.
- Total penduduk di Wallacea tahun 2010 mencapai 29.102.349 jiwa atau 12% dari total jumlah penduduk di Indonesia.
- Pemerintah telah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wallacea dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu KEK Palu, KEK Motorai, KEK Mandalika dan KEK Bitung.

	Provinsi	Tahun Dibentuk	Potensi Geoekonomi	Konektivitas
KEK Palu	Sulawesi Tengah	2014	- Aneka industri yang berbasis sumber daya alam pertanian dan perkebunan seperti karet, kakao, rotan, rumput laut. - Industri berbasis sumber daya alam pertambangan antara lain nikel, emas, biji besi, dan timbal.	- Jalur perdagangan nasional dan internasional (terutama dari Australia ke Asia Timur) - Penghubung kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan negara lain seperti Malaysia, dan Filipina.
KEK Bitung	Sulawesi Utara	2014	- Penghasil ikan terbesar di Indonesia - Industri pengolahan perikanan	- Pusat distribusi barang - Penunjang logistik di kawasan timur Indonesia - Memiliki akses internasional khususnya ke BIMP-EAGA, AIDA, Asia Timur, dan Pasifik
KEK Morotai	Maluku Utara	2014	- Jalur migrasi ikan tuna - Memiliki objek wisata sejarah skala dunia	Dekat dengan Jepang dan Taiwan
KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat	2014	- Memiliki objek wisata bahari - Memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya	- Dekat dengan Pulau Bali - Dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok

Sumber: Diolah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Rencana Strategis Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Morotai, dan Mandalika.

BUDA YA

- Salah satu nilai kehati yang telah diakui UNESCO dan UNEP pada KTT Dunia mengenai keberlangsungan Kehati di muka bumi yang diadakan di Johannesburg tahun 2002 adalah budaya.
- Wallacea yang mencakup tiga bioregion (Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara) saat ini masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya baik budaya yang dapat terlihat langsung melalui cagar budaya, museum dan lain sebagainya, dan nilai-nilai budaya yang tidak terlihat langsung (budaya tidak benda).
- Warisan Budaya Tak Benda dibagi lagi ke dalam lima bentuk yaitu: (1) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan; (2) kemahiran dan kerajinan tradisional; (3) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; (4) seni pertunjukan; dan (5) tradisi dan

27 05 2013

Provinsi	Cagar Budaya	Museum	Warisan Budaya Tak Benda
Sulawesi Utara	16	6	265
Gorontalo	8	1	223
Sulawesi Tengah	5	3	143
Sulawesi Selatan	66	16	175
Sulawesi Barat	0	3	63
Sulawesi Tenggara	5	4	114
Maluku	16	2	115
Maluku Utara	21	4	70
Nusa Tenggara Barat	10	4	65
Nusa Tenggara Timur	2	11	101
	149	54	1.334

Sumber: Statistik Kebudayaan 2011, BPS dan Endikbud RI

Beberapa nilai budaya merupakan wujud perlindungan terhadap sumber daya alam (konservasi) dalam bentuk aturan-aturan menjaga hutan, danau, sungai, pesisir dan sumber daya alam lainnya.

Contohnya:

1. Penetapan Borong Karamaka di Komunitas Adat Ammatoa Kajang-Bulukumba
2. Sasi Lompa di Haruku Maluku
3. Awig-Awig di Teluk Jor Lombok Timur
4. Dll.

KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

- Jumlah OMS terus tumbuh berkembang di Wallacea, baik OMS jenis payung maupun OMS pelaksana di lapangan.
- Selama 2017-2019, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan OMS, baik landasan berorganisasi, tata kelola organisasi, tata laksana organisasi, dan keberlanjutannya.
- Hal terpenting dalam asesmen tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas dalam isu konservasi.

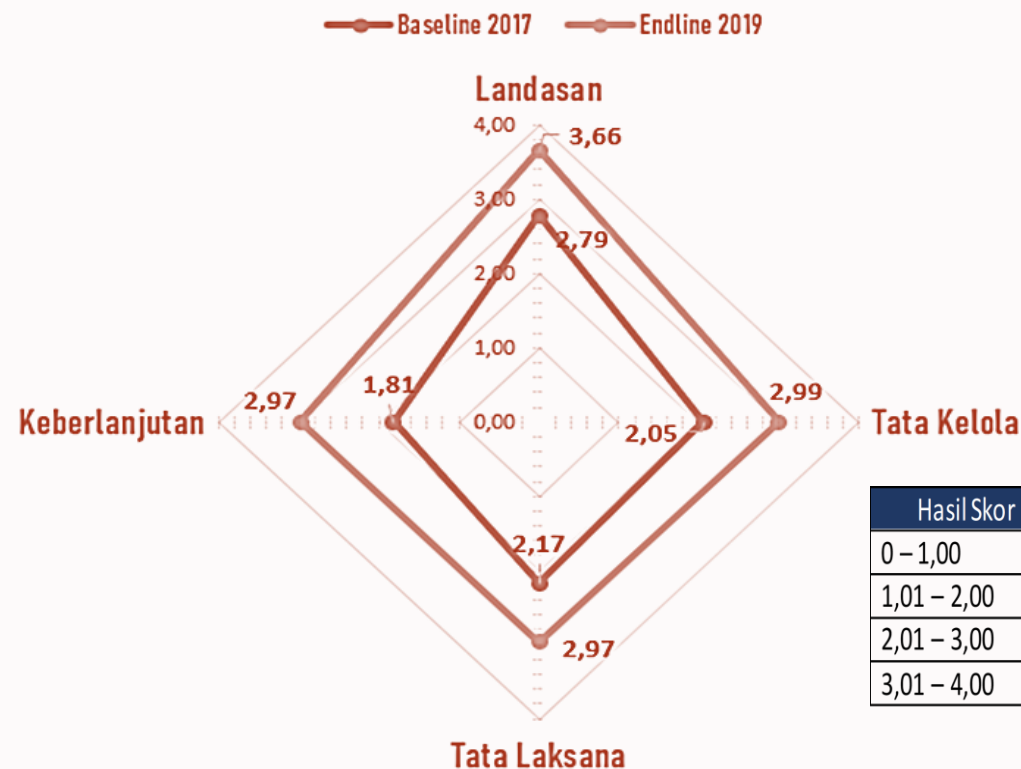


HASIL PENILAIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN OMS PROGRAM KEMITRAAN WALLACEA

PERIODE 2017-2019 Organisasi

1. Penemuan Gagasan dan Pembentukan Kelompok (Imagine and Inspire)
2. Penetapan Bentuk dan Kerangka Organisasi (Found and Frame)
3. Pertumbuhan Awal dan Penyempurnaan Sistem (Ground and Grow)
4. Pertumbuhan Maksimal dan Membangun Keberlanjutan (Produce and Sustain)
5. Penemuan Titik Relevansi Baru (Review and Renew)

Hasil Penilaian Kapasitas Kelembagaan OMS Program Kemitraan Wallacea Menggunakan Instrumen PERANTI

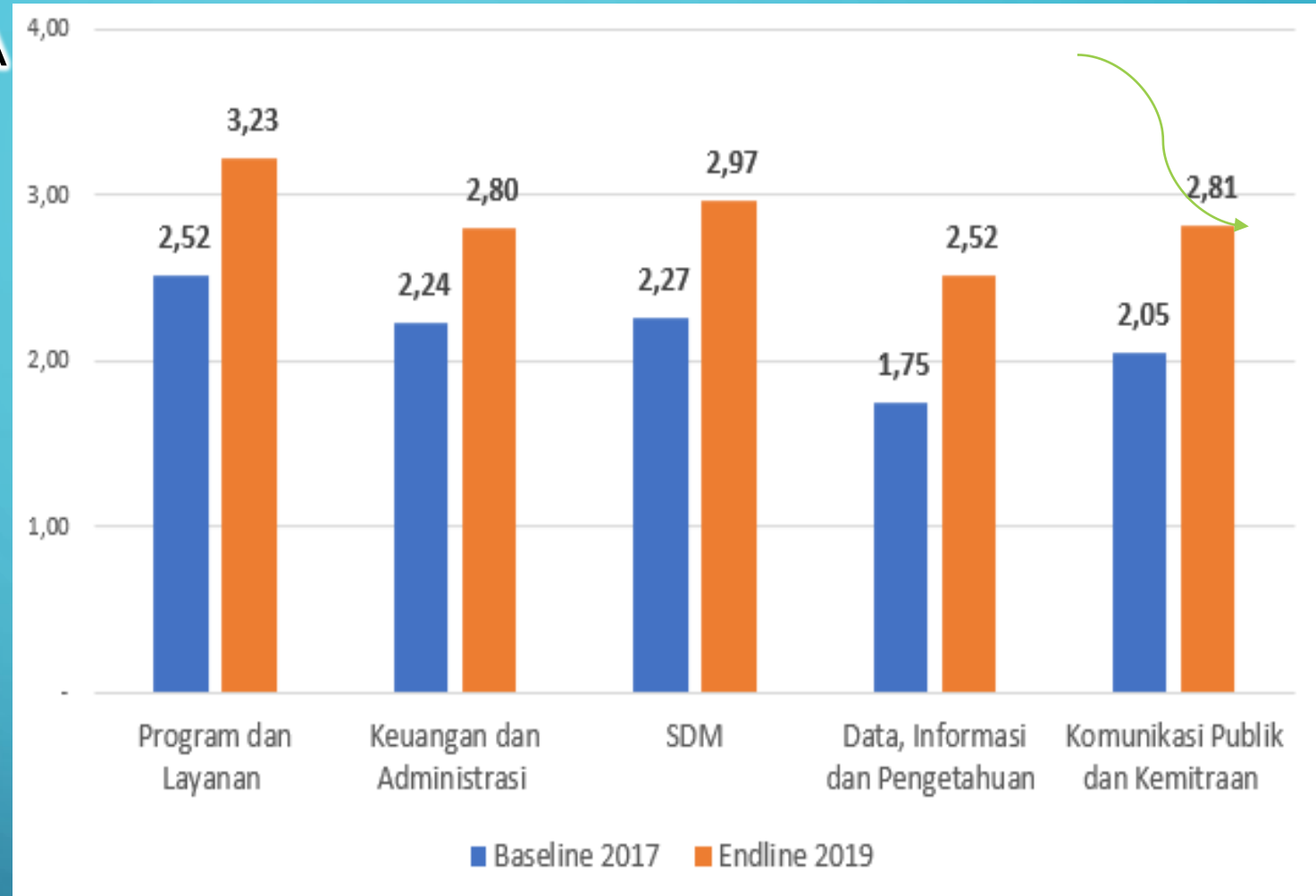


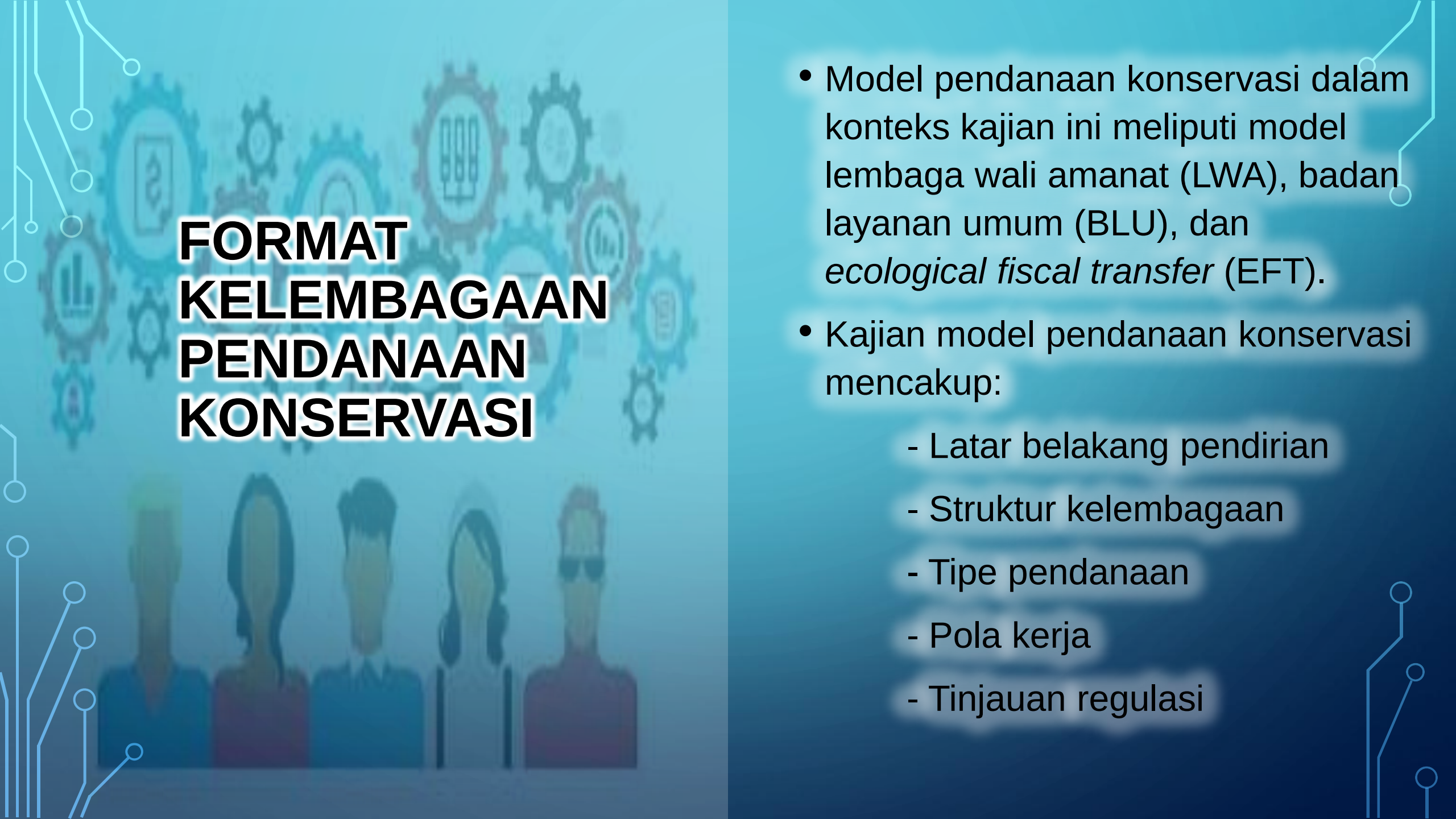
Hasil Skor	Penilaian
0 – 1,00	Buruk
1,01 – 2,00	Kurang
2,01 – 3,00	Cukup
3,01 – 4,00	Baik

Baseline Kapasitas: 2,21
Endline Kapasitas: 3,15
Rata-rata peningkatan: 0,94

KAPASITAS TATA LAKSANA ORGANISASI PADA OMS PROGRAM KEMITRAAN WALLACEA

Baseline Kapasitas: 2,17
Endline Kapasitas: 2,97
Rata-rata peningkatan: 0,81





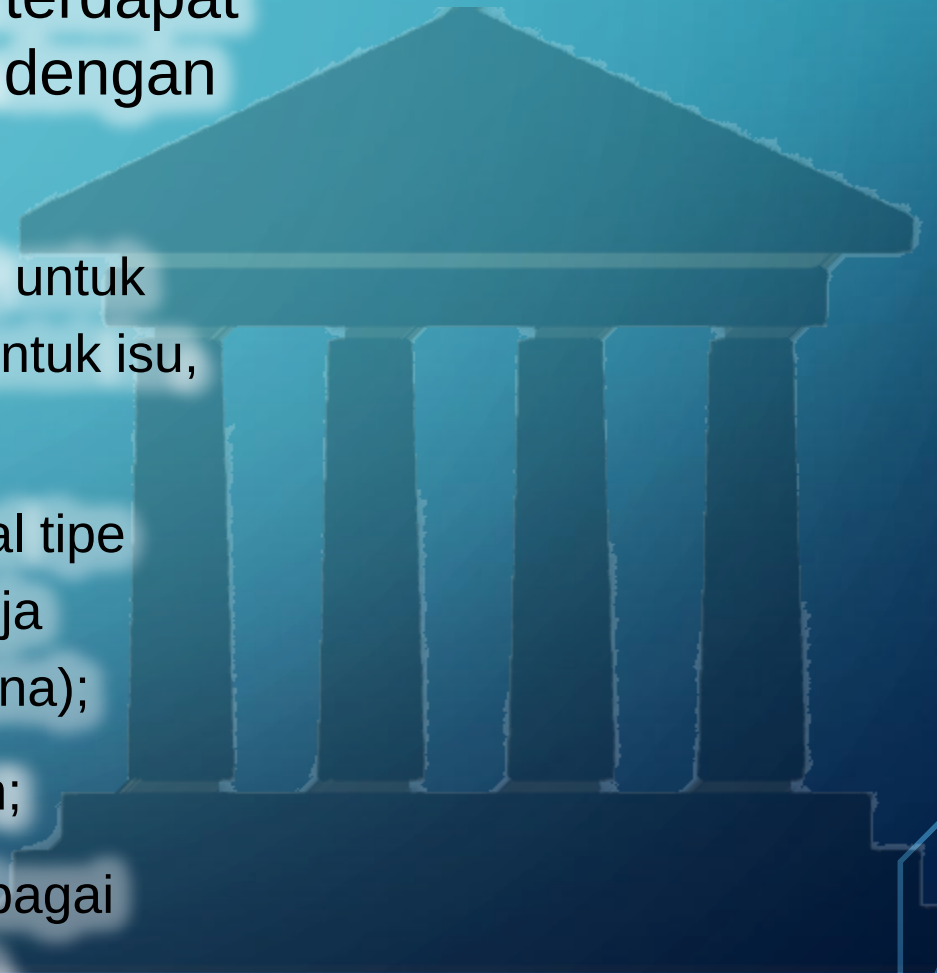
FORMAT KELEMBAGAAN PENDANAAN KONSERVASI

- Model pendanaan konservasi dalam konteks kajian ini meliputi model lembaga wali amanat (LWA), badan layanan umum (BLU), dan *ecological fiscal transfer* (EFT).
- Kajian model pendanaan konservasi mencakup:
 - Latar belakang pendirian
 - Struktur kelembagaan
 - Tipe pendanaan
 - Pola kerja
 - Tinjauan regulasi

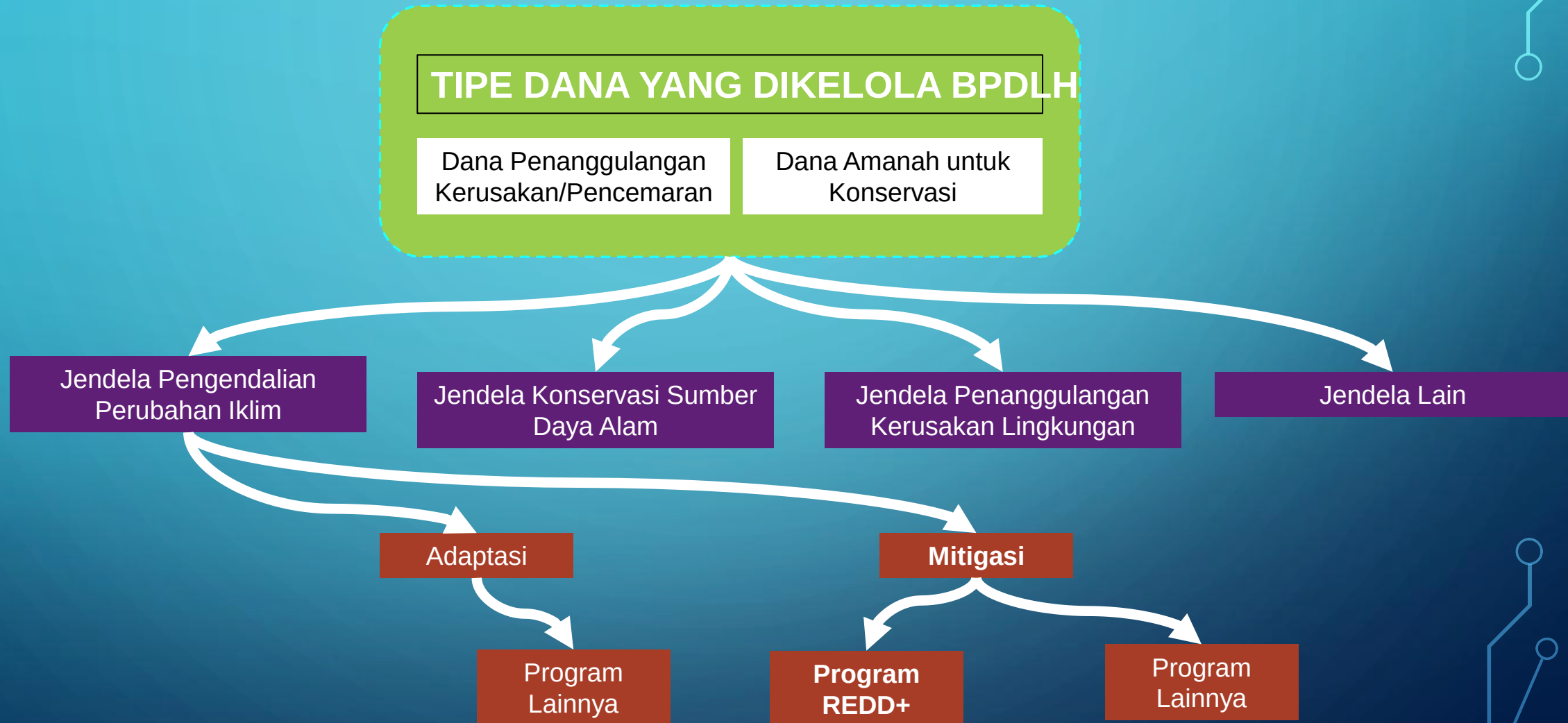
LATAR BELAKANG PENDIRIAN

Berdasarkan latar belakang pendirian LWA, terdapat beberapa ciri khas yang membedakan LWA dengan organisasi masyarakat sipil lainnya:

1. LWA diberi amanah oleh pemberi dana (*trustor*) untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat untuk isu, lokasi, dan tujuan tertentu;
2. Jelasnya mandat pendirian organisasi dalam hal tipe pendanaan (EF, SF, RF, dan RBP) dan pola kerja (menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana);
3. Biasanya menggunakan badan hukum yayasan;
4. LWA akan dominan mengambil posisi tawar sebagai pengelola dana dan bukan implementor proyek.



STRUKTUR JENDELA PENDANAAN PADA BLU DANA LH



Badan Layanan Usaha Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan BLU Pusat P2H

Visi:

“Menjadi pusat pembiayaan yang profesional dan terpercaya untuk mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan”

On Farm: Usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan lainnya melalui pola murni (monokultur) atau campuran (wanatani/agroforestry).
Off farm: adalah usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan on farm.

ON-FARM

1. Pembuatan Tanaman Kehutanan
2. Refinancing Tanaman Kehutanan
3. Wanatani (Agroforestry)
4. Pembibitan Tanaman Kehutanan
5. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan
6. Tunda Tebang Tanaman Kehutanan
7. Komoditas Nonkehutanan
8. Pemanenan Tanaman Kehutanan
9. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

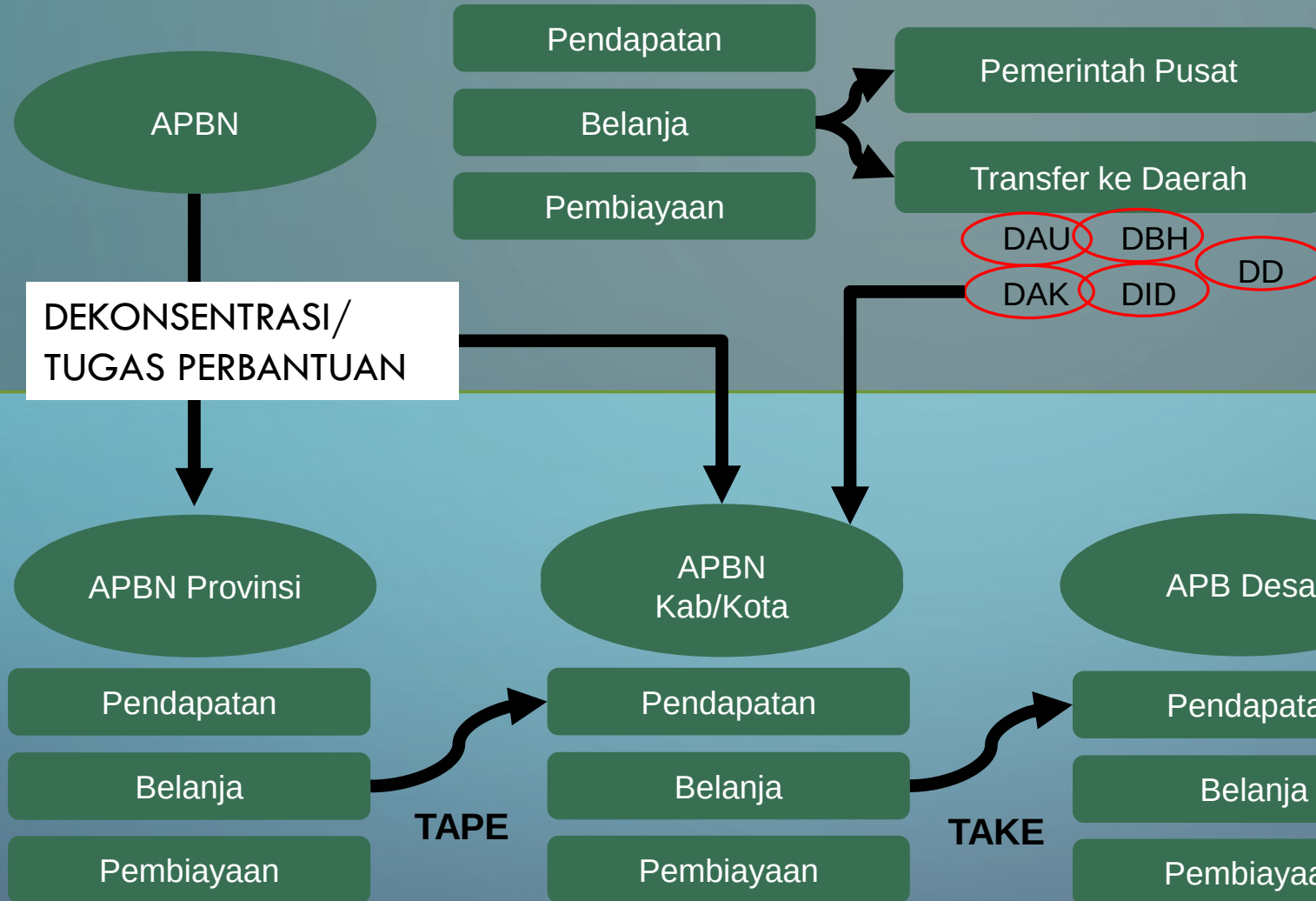
OFF-FARM

Pengolahan Hasil Hutan

Sarana Produksi

ECOLOGICAL FISCAL TRANSFER

- Belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, subsidi
- Bansos, pembayaran bunga/utang

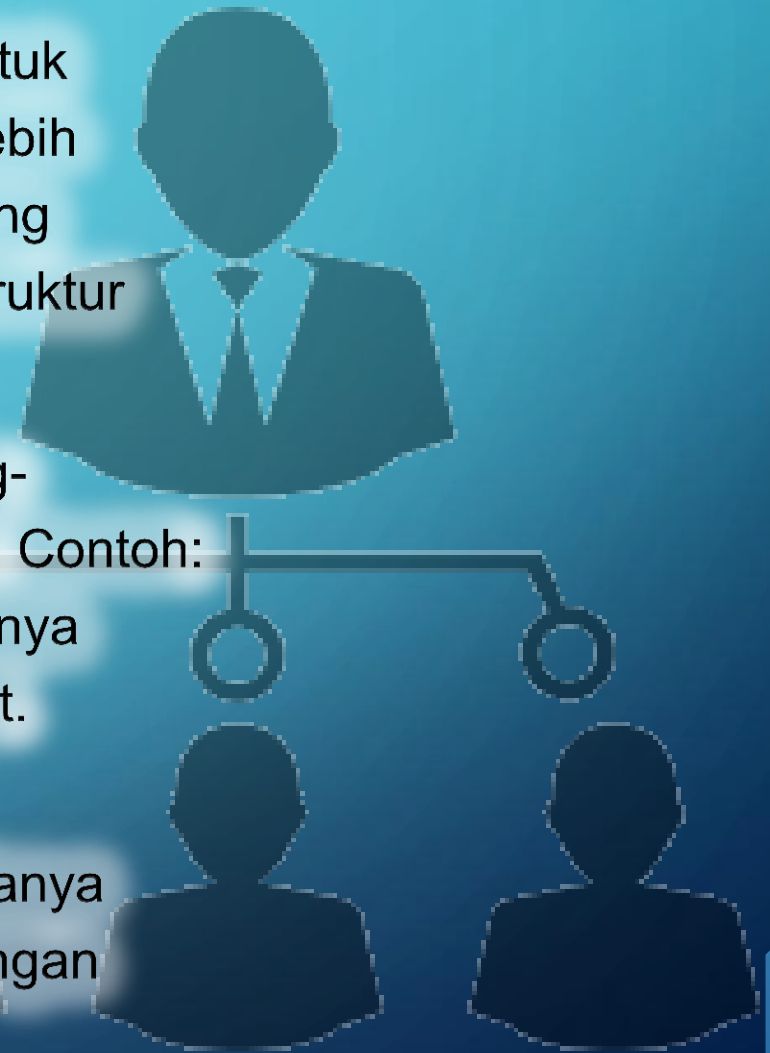


Permendesa PDTT No 19/2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Pelestarian Lingkungan Hidup

STRUKTUR KELEMBAGAAN

- Struktur pendanaan konservasi sangat tergantung pada bentuk badan hukum/ regulasi yang dipilih. Biasanya di Indonesia lebih banyak menggunakan badan hukum yayasan untuk LWA yang independen, karena itu itu struktur lembaganya mengikuti struktur kelembagaan yayasan.
- Untuk LWA yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, struktur akan mengikuti regulasi yang ditetapkan. Contoh: Perpres 80/2011 tentang Dana Perwalian menyebut strukturnya terdiri atas Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat.
- Belum ada struktur khusus yang mengakomodir kekhasan kelembagaan pendanaan konservasi di mana diperlukan adanya kebijakan pengurangan pajak, perlindungan investasi, dukungan pemerintah, dll.



TIPE PENDANAAN

- Di antara tipe pendanaan yang ditemukan dalam kajian, terdapat 4 tipe pendanaan yang umum digunakan di Indonesia, yaitu:
 - (1) *Endowment Fund* (Dana Abadi)
 - (2) *Sinking Fund* (Dana Menurun)
 - (3) *Revolving Fund* (Dana Bergulir)
 - (4) *Result Based Payment* (Pembayaran Berbasis Hasil)
- Dari 4 tipe tersebut, tipe *Endowment Fund* masih jarang ditemukan pada kelembagaan pendanaan konservasi.
- Biasanya penerapan tipe pendanaan bercampur di antara keempat tipe tersebut.



POLA KERJA

- Pola kerja pendanaan konservasi di negara-negara lain biasanya mencakup tiga tahapan yaitu penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana.
- Di Indonesia, lembaga pendanaan konservasi umumnya menerapkan dua tahapan yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Meskipun ada lembaga yang menggunakan tiga tahapan secara konsisten dan sistematis yaitu Yayasan KEHATI.
- Kurang tumbuh berkembangnya lembaga pendanaan konservasi diasumsikan karena tidak menggunakan tahapan pemupukan dana. Dana yang dikelola oleh lembaga pendanaan tidak berkelanjutan.
- Varian inisiatif pemupukan dana masih minim di Indonesia. Biasanya pemupukan dana dilakukan melalui pasar modal dan skema investasi dalam perdagangan karbon. Kedua inisiatif ini pun masih belum banyak yang melakukannya.

Fumbio di Brazil, The Sangha Trinational Foundation, The Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation, The Thai Energy Conservation Promotion Fund

Anggota The Nature Trust Alliance (NTA) yaitu PONT (Prespa Ohrid Nature Trust), Blue Ocean Trust, dan Caucasus Nature Fund (CNF)

TINJAUAN REGULASI

- UU Yayasan sebagai payung hukum LWA belum mengatur pengurangan pajak bagi pendanaan LWA dan belum mengatur perlindungan investasi untuk LWA. Investasi yang dilakukan LWA selama ini mengacu pada UU Pasar Modal.
- Perpres 80/2011 tentang Dana Perwalian cukup fleksibel digunakan untuk semua isu, termasuk konservasi dan pengendalian perubahan iklim. Perpres ini tidak mengatur kemungkinan LWA menggunakan tipe pendanaan *endowment fund*.
- Perpres 77/2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup digunakan oleh BLU untuk mengelola dana-dana yang bersumber dari APBN, hibah, RBP, dan sumber lainnya yang sah. Saat ini belum terimplementasikan karena belum ada aturan teknisnya.
- Terkait regulasi yang mengatur transfer anggaran daerah berbasis ekologi cukup aplikatif karena diatur melalui UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, UU Perlindungan Lingkungan Hidup, dan PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

BAGIAN KETIGA: PETA JALAN MENUJU ALIANSI PENDANAAN WALLACEA



POSISI DAN PERAN STRATEGIS ALIANSI PENDANAAN WALLACEA

Berperan :

1. Penggalangan dan pengelolaan sumber daya
2. Menjadi penggerak terwujudnya kolaborasi para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil

Posisi :

Bersinergi dan bekerja sama dengan multistakeholder dalam upaya menekan laju kepunahan spesies endemis di Wallacea dan melakukan pengendalian perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi.

BENTUK DAN STRUKTUR

Bentuk :

- Opsi 1 - Kolaborasi Para Pihak dengan Sekretariat Independen (mirip seperti the Nature Trust Alliance/NTA dengan peran diperluas)
- Opsi 2 - Kolaborasi Para Pihak dengan Kewenangan pada Kementerian/Lembaga
- Opsi 3 - Yayasan / Perkumpulan (Lembaga Wali Amanah)

Struktur Organisasi :

Struktur organisasi tergantung pada payung hukum Aliansi.

PEMETAAN FUNGSI ANGGOTA ALIANSI

Fungsi Anggota Aliansi antara lain :

- Pengambil kebijakan (Kementerian LHK, KKP, dan Kementerian Keuangan, dan Bappenas)
- Lembaga Wali Amanah (menghimpun, memupuk, dan menyalurkan)
- Organisasi Masyarakat Sipil (pendampingan, law enforcement, species and habitat, research and development, policy development, dalam situasi khusus dapat menyalurkan pendanaan)
- Perguruan tinggi (species and habitat, research and development, policy development)
- Badan Layanan Umum (skema pemberian modal di areal hutan produksi)
- Pemerintah Daerah (pelaksanaan *ecological fiscal transfer*)

SISTEM DAN MEKANISME

1. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan (Financial Policies and Procedures Manual)
2. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Akuntansi (Accounting Policies and Procedures Manual)
3. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Program (Program Management Policies and Procedures Manual)

PROGRAM STRATEGIS

1. Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
2. Program Mitigasi dan Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim
3. Program Restorasi Kawasan Kritis
4. Program Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Transfer Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Ekologi
5. Program Peningkatan Kapasitas OMS dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
6. Program Penguatan Kebijakan Tata Ruang Berbasis Ekosistem dan Kearifan Lokal

REKOMENDASI AWAL

1. Perlunya membangun platform bersama untuk pelembagaan pendanaan konservasi dan pengendalian perubahan iklim di Wallacea.
2. Perlunya membangun kesepahaman bersama dalam isu konservasi dan pengendalian perubahan iklim, keterkaitan tata ruang, dan pengakuan dari seluruh aktor-aktor kunci.
3. Perlunya menyusun perencanaan kolaborasi untuk meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi serta meminimalkan ancaman spesies dan mengendalikan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi.
4. Mengimplementasikan rencana aksi secara efektif dan tepat waktu, terbuka terhadap adaptasi seiring pembelajaran yang diperoleh.
5. Monitoring untuk memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan yang adaptif.

- UNDP (2016): Beberapa LWA selama 20 tahun beroperasi terbukti cukup progresif menambah jumlah pendanaan baik dari endowment fund maupun sinking fund.
 - The Mexican Fund for the Conservation of Nature (MFCN) memupuk 120 juta USD dari dana endowment fund dan mengelola sinking fund secara paralel.
 - The Madagascar Foundation memupuk dana 50 juta USD di tengah kondisi situasi tarik-menarik kepentingan elit politik dan masalah keamanan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, dan tingginya dekonsentrasi ketimbang desentralisasi pemerintahannya.
 - Fumbio di Brazil yang sudah meningkatkan modalnya di atas 500 juta USD,
 - The Sangha Trinational Foundation memupuk modal sebesar 28 juta USD dengan memutar sinking fund sebesar 8 juta USD. Tidak mudah mengumpulkan pendanaan di tiga negara Kamerun, Republik Afrika Tengah dan Republik Kongo
 - The Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation memupuk endowment fund sebesar 44 juta USD dari dana awal 21 juta USD
 - The Thai Energy Conservation Promotion Fund memutar modal melalui revolving fund hingga mendapatkan penghasilan per tahun 225 juta USD
- KEHATI (2019): Dari modal awal awal endowment tahun 1994 sebesar 16,5 juta USD, saat ini sudah mencapai 150 juta USD



Contoh OMS Payung di Wallacea

OMS	Area Kerja di Wallacea	Fokus Aktivitas
Burung Indonesia	Sumba, Flores, Sulawesi Bagian Utara, Halmahera	Perlindungan hutan di dalam area perlindungan dan bentang alam
CARE	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
Coral Triangle Centre	Kepulauan Banda	Kreasi dan dukungan untuk area perlindungan laut
FFI	Lombok	Pengelolaan DAS
GEF Small grants program	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Kehati	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Oxfam	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
Samdhana Institute	Tidak spesifik	Hibah kecil untuk OMS lokal
Save the Children	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
Swisscontact	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
TNC/Rare	TN Laut Sawu, Sumbawa, Wakatobi, Komodo, Lombok, Sulawesi Selatan dan Tenggara	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut, regulasi perdagangan penjualan ikan online
WCS (Marine)	Sulawesi Utara, Lombok	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut
WCS (Terrestrial)	Sulawesi Bagian Utara	Area Hutan Lindung, perdagangan satwa liar
Wetlands International	Flores	Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove
World Neighbors	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
World Vision	Nusa Tenggara	Pemberdayaan masyarakat
WWF (Marine)	Koridor laut dari Flores Timur ke Timor, Laut Banda, Komodo	Aksi-aksi dan dukungan untuk area perlindungan laut
WWF (Terrestrial)	Gunung Mutis (Timur), Rinjani (Lombok)	Rehabilitasi dan perlindungan hutan



	Kendala Regulasi
LWA Multipihak	Pola kerja pemupukan dana
LWA Independen	Tidak ada kendala signifikan, namun perlu diperkuat dalam hal investasi untuk pemupukan dana
BLU/BPDLH	Tidak ada kendala regulasi
TAE	Belum ditemukan kendala regulasi, namun perlu memperhatikan indikator yang sesuai dengan karakteristik ekologi Wallacea.

Pola Kerja
○○○ Perpres 80/2011 ttg Dana Perwalian
○○○ - UU 17/2013 ttg Ormas - UU No. 16 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
○○○ Perpres 77/2018 ttg Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
○○○